

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D.K. dan Suhardjo Y. (2013). "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". **Jurnal STIE Semarang**. Vol.5 No.3. Hlm. 93-111.
- Albugis F. Febriana. (2016). "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara". **Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado** Vol.4 No.3. Hlm. 078-089
- Andini, D. dan Yusrawati, (2015). "Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". **Jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi** Universitas Islam Riau Vol.24. Hlm. 65-82.
- Ariesta, Fadila. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. **Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang**. Hlm. 1-17
- Azlim, D. dan Usman A.B. (2012). "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh". **Jurnal akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala**. Hlm. 1-14.
- Badan Statistik Daerah. (2016). Naskah Publikasi Pemerintahan. <https://jatim.bps.go.id> diakses tanggal 28 Februari 2016
- Bastari Imam. (2004). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah. **Jurnal Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta
- Bastian, Indra. (2007). **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta. Erlangga.
- Darise, Nurlan. (2008). **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**. Edisi Pertama. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Departemen Keuangan, (2002). Pokja IV Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Ghozali, Imam. (2006). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Edisi 3. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). **Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah** (seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Humairoh, Dian Iftitah. (2013). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. **Artikel** Akuntansi Universitas Negeri Jember. Hlm. 1-5
- Kepala Badan Kepegawaian Negara, (2013). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS.
- Kiranayanti dan Erawati, (2016). “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. **Jurnal** akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.2. Hlm. 1290-1318
- Langelo Friska, dkk. (2015). “Analisis Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis Akruar Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung”. **Jurnal** EMBA universitas Sam Ratulangi Manado. 3(I). Hlm. 1-8.
- Mardiasmo. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi
- Menteri Dalam Negeri, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- Mulyadi. (2001). **Sistem Akuntansi**. Edisi Tiga. Jakarta Salemba Empat
- Nugroho, Setyo. (2012). **Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010**. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. (2010). **Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2**. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., Iswahyudi, S.P. & Maulidah R. (2007). **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta: Salemba Empat
- Palan, R., (2008). **Competency Management**. Jakarta Pusat. Penerbit PPM
- Peraturan Pemerintah, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan.
- _____, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tahun 2010.

- _____, 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- _____, 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- _____, 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.
- _____, 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Permadi, Dwi Angga. (2013). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". **Skripsi** Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
- Pradono dan Basukianto. (2015). "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan". **Jurnal** Bisnis dan Ekonomi (JBE). Hlm. 188-200
- Pratiwi Putu Ratih, dkk. (2015). "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". **Jurnal** akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. 3(I). Hlm. 1-12.
- Roviyantie, Devi. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. **Jurnal** akuntansi Universitas Siliwangi.
- Santoso, Slamet. (2015). **Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengolahan Data**. Ponorogo: UMPO Press.
- Sugiono, (2013). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung. Alfabeta.
- Suliyanto. (2005). **Metode Riset Bisnis**. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia, (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 69 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

_____, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Wati, dkk. (2014). “ Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. **Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha**. 2(1). Hlm. 1-11.

